

ABSTRACT

Sesuai Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT 2007), Kejaksaan diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas ke Pengadilan. Alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan yaitu Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam UU PT 2007 tidak dijelaskan tentang pengertian melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kurang lebih sekitar 19 peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi kepentingan umum baik secara intensional maupun secara ekstensional dan putusan pengadilan yang memberikan definisi secara evaluatif, maka definisi dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan masyarakat atau kepentingan pembangunan atau kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan menghormati kepentingan-kepentingan lain dengan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim / Pengadilan. Kepentingan umum meliputi kurang lebih 70 (tujuh puluh) kepentingan. Sedangkan sesuai Pasal 2 UU PT 2007 dan perkembangan Pasal 1365 Bugerlijk Wetboek maka perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis, sehingga secara khusus perbuatan pidana yang dilakukan oleh direksi dapat digunakan sebagai alasan oleh Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas ke Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh direksi tersebut dilakukan untuk menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas, untuk kepentingan Perseroan Terbatas, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT 2007 dan/atau anggaran dasar Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

According to constitution number 40, years of 2007 chapter 146 about Limited Company, public prosecutor had given authority to propose petition dispersing of Limited Company to The Court. Limited Company had violated the law or general necessities. That was the reason used to propose petition dispersing of Limited Company by public prosecutor. Constitution number 40, years of 2007 about Limited Company was not clarified about the sense of violated the law or general necessities. The Court and about 19 rules of legislation have given definition of general necessities intentionally or extensively. Therefore, the definition of general necessities are necessity of nation, necessity of state, necessity of society or necessity of development or necessity which must be prioritized than other necessities and should constantly respect to them and delegate the judgment to the adjudicator/the court. General necessities consist of approximately 70 necessities. In the other hand, according to constitution number 40, years of 2007 chapter 2 about Limited Company, and the development of chapter 1365 BW, therefore the action which violated the law could be implied as the action of violated the law written or unwritten. Especially the action of criminal which had been done by the direction could be used as the reason by public prosecutor to propose petition dispersing of Limited Company to The Court, with condition that the action of criminal that had been done by the direction was done for operating management of Limited Company, the importance of Limited Company, and appropriate to goal and intention of Limited Company in wisdom considered accurate, and in limit which has been decided on constitution PT 2007 and/or base valuation of Limited Company.